ABSTRAK

- Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka penetapan besaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya penetapan nilai perolehan air tanah yang merupakan komponen utama dalam perhitungan besaran pajak air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah maka Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pembagian Wilayah Kelompok Nilai Perolehan Air Tanah, Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah, Volume Pengambilan Air Tanah.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.